

Strategi Ketidaksantunan dalam Konfrontasi Verbal: Debat Isu Ijazah Palsu Jokowi YouTube iNews

Intan Latifah Nuratmojo ¹

Teguh Setiawan ²

Setyawan Pujiono³

¹²³ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta

¹intanlatifah.2025@student.uny.ac.id

²teguh_setiawan@uny.ac.id

³setyawan_p@uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk dan tujuan penggunaan strategi ketidaksantunan berbahasa dalam debat isu Ijazah Palsu Jokowi di kanal YouTube Official iNews. Penelitian ini penting untuk dilakukan guna memahami fenomena degradasi etika komunikasi dalam diskursus politik di ruang digital yang berpotensi memicu polarisasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori ketidaksantunan dari Jonathan Culpeper dalam kerangka sosiopragmatik. Data penelitian ini merupakan transkrip argumen para tokoh dalam debat yang dikumpulkan melalui teknik simak dan catat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari total 305 tuturan, terdapat 107 yang tergolong dalam 5 jenis ketidaksantunan, dengan persentase kemunculan pada ketidaksantunan langsung 19%, ketidaksantunan positif 34%, ketidaksantunan negatif 19%, sarkasme dan ejekan 10%, dan ketidaksantunan tidak langsung 18%. Tujuan penggunaan strategi tersebut didominasi oleh upaya meruntuhkan kredibilitas lawan secara terbuka, mempertahankan argumen, dan mendelegitimasi otoritas pihak lawan dalam konfrontasi verbal. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi pragmatik mengenai ketidaksantunan dalam konfrontasi verbal dan menjadi sumber referensi masyarakat dalam menjaga etika komunikasi di ruang publik digital.

Kata Kunci : *ketidaksantunan, konfrontasi verbal, sosiopragmatik, debat*

Pendahuluan

Diskursus politik di ruang digital saat ini banyak diwarnai oleh fenomena konfrontasi verbal dan agresi bahasa yang mengaburkan batasan kesantunan publik. Graham dan Hardaker (2017) mengungkapkan bahwa interaksi digital yang terjadi secara intens secara alami dapat mengubah ekspektasi masyarakat terhadap norma kesantunan, bahkan memunculkan sisi gelap komunikasi berupa penghinaan massa, yang saat ini menjadi perhatian dalam kajian linguistik. Fenomena ini terlihat secara nyata dalam komunikasi para tokoh pada debat isu Ijazah Palsu Jokowi di kanal YouTube Official iNews. Dalam sudut pandang *cyberpragmatics*, penggabungan dimensi bahasa, teknologi, dan media digital ini menciptakan ruang tutur yang kompleks (K. Rahardi, 2020). Hal tersebut menegaskan bahwa ketidaksantunan tidak lagi sekadar luapan emosi, melainkan strategi verbal yang secara sengaja dilakukan untuk memengaruhi persepsi publik dan menjatuhkan kredibilitas lawan politik. Di Indonesia, pemilihan strategi agresi verbal ini juga tidak dapat dilepaskan dari konteks regulasi hukum lokal seperti UU ITE, yang secara tidak langsung memaksa penutur mengalkulasi bentuk tuturan mereka agar terhindar dari konsekuensi pidana pencemaran nama baik di ruang siber.

Dalam ruang lingkup pragmatik modern, debat politik telah bertransformasi menjadi arena kontestasi kekuasaan, tempat bahasa digunakan sebagai alat retorik substantif guna memenangkan opini publik (Aminuddin dan Musfiroh, 2025; Simanjuntak dan Simatupang, 2024). Pada arena yang kompetitif ini, ketidaksantunan tidak dipandang sebagai bentuk kegagalan komunikasi, melainkan pilihan yang strategis yang dilakukan secara sadar dan terukur (Culpeper et al., 2017). Menurut Culpeper, manifestasi ketidaksantunan dapat diidentifikasi melalui lima strategi utama: *bald on record impoliteness* (ketidaksantunan langsung tanpa basa-basi), *positive impoliteness* (menyerang citra positif lawan), *negative impoliteness* (membatasi kebebasan lawan), *sarcasm/mock impoliteness* (ejekan), dan *off-record impoliteness* (ketidaksantunan tidak langsung). Kelima strategi ofensif ini dimanfaatkan secara sengaja oleh penutur dengan cara mengabaikan norma kesantunan demi merusak citra diri dari lawan tutur, memicu konflik percakapan, sekaligus mengontrol jalannya debat politik (Bousfield, 2008; Khoironi et al., 2025; Leech, 2014).

Meskipun kajian mengenai strategi ketidaksantunan ini terus berkembang, penelitian mengenai ketidaksantunan berbahasa dinilai belum banyak dieksplorasi lebih dalam oleh para ahli pragmatik (R. K. Rahardi et al., 2014). Mayoritas penelitian terdahulu memiliki kecenderungan dominan pada analisis ketidaksantunan dalam teks tertulis searah dan anonim, seperti komentar netizen di media sosial seperti penelitian yang dilakukan oleh Nurfitri et al. (2026). Di sisi lain, penelitian yang mengkaji komunikasi lisan masih sangat terbatas. Beberapa penelitian yang mengkaji komunikasi lisan umumnya baru menyentuh interaksi dialogis, monolog, atau wawancara searah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Aminuddin dan Musfiroh (2025) mengenai pidato presiden. Analisis mengenai pola interaksi lisan dua arah secara langsung antartokoh publik dalam mempertahankan eksistensi politiknya belum terpetakan dengan komprehensif. Akibatnya, dinamika perubahan strategi ketidaksantunan secara responsif saat melakukan konfrontasi verbal yang terjadi di ruang digital belum banyak yang terungkap.

Kesenjangan teoretis dan empiris tersebut yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada lokus data berupa interaksi debat lisan dua arah secara sinkronus di *platform* digital YouTube yang membedah isu politik kontroversial dan sensitif tingkat nasional, yaitu keabsahan ijazah seorang kepala negara. Berbeda dengan riset terdahulu, penelitian ini memformulasikan secara konkret bagaimana fungsi retorik dari kelima strategi ketidaksantunan Culpeper diproduksi secara responsif serta dinamis sebagai senjata verbal untuk melumpuhkan wibawa lawan di ruang terbuka. Melalui genre komunikatif debat politik digital yang berfungsi ganda sebagai penyedia informasi sekaligus hiburan konfrontatif (*infotainment*) bagi publik (Hernández-Flores, 2008; Şekerci, 2023). Dengan begitu penelitian ini dapat memberikan antitesis empiris mengenai risiko penggunaan strategi tersebut terhadap citra pembicara itu sendiri di mata audiens siber yang kritis.

Berdasarkan analisis kesenjangan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana bentuk dan tujuan penggunaan strategi ketidaksantunan berbahasa dimanifestasikan sebagai alat retorik dalam debat isu Ijazah Palsu Jokowi di kanal YouTube Official iNews. Dengan menggunakan pisau analisis teori ketidaksantunan Jonathan Culpeper yang komprehensif meliputi *bald on record impoliteness*, *positive impoliteness*, *negative impoliteness*, *sarcasm/mock impoliteness*, dan *off record impoliteness* penelitian ini secara khusus membedah pola pemicuan konflik dan dominasi wacana. Secara teoretis, hasil kajian ini memperluas cakupan pragmatik siber (*cyberpragmatics*) dalam memetakan konfrontasi politik lisan yang kompleks. Secara

praktis dan sosial, penelitian ini berkontribusi memperluas urgensi literasi digital yang tidak hanya terpusat pada aspek teknis, melainkan juga pada dimensi etika komunikasi publik guna mendukung transformasi pendidikan moral masyarakat di ruang siber (Fadlilah et al., 2023; Mayrita et al., 2025).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan analisis serta pendeskripsian secara mendalam terhadap objek yang diteliti. Objek penelitian ini adalah wacana debat yang berfokus pada konfrontasi verbal dalam video "Ijazah Palsu Jokowi" pada kanal YouTube Official iNews yang diunggah pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan tautan <https://youtu.be/iuyrDfhmxVQ?si=yzvL2ZQ5prS41csO> (Official iNews 2025). Video dengan durasi dua jam tersebut telah ditonton sebanyak 1,3 juta penonton dan diakses pada tanggal 24 April 2026. Subjek penelitian ini adalah para tokoh dan pembicara yang terlibat langsung di dalam tayangan debat tersebut. Sumber data berupa transkrip argumen para tokoh yang mengandung unsur ketidaksantunan atau serangan muka (*face attack*). Pengambilan data menggunakan teknik simak dan catat, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen utama (*human instrument*) dalam proses pengumpulan dan analisis data. Sementara keabsahan data dilakukan dengan teknik peningkatan ketekunan dalam penelitian dan memperpanjang waktu penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui tahap kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2013). Pada tahap kondensasi data, tuturan yang telah ditranskrip dikelompokkan ke dalam lima strategi ketidaksantunan Jonathan Culpeper, yaitu ketidaksantunan langsung (*bald on record*), ketidaksantunan positif (*positive impoliteness*), ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), Sarkasme atau ejekan (*sarcasm/mock impoliteness*), dan ketidaksantunan tidak langsung (*offrecord impoliteness*). Setelah dikelompokkan, data tersebut akan disajikan dengan diuraikan secara mendalam untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk strategi ketidaksantunan dan juga mengungkap tujuan penutur menggunakan strategi tersebut dengan kacamata sosiopragmatik. Terakhir dilakukan penarikan kesimpulan untuk memverifikasi temuan mengenai ketidaksantunan dalam konfrontasi verbal pada debat tersebut.

Hasil

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada sumber data utama, terdapat total 305 tuturan di dalam video debat bertajuk "Roy Suryo CS Vs Jokowi Lovers Panas! Siapa Masuk Penjara Negara Kasus Ijazah Jokowi? Rakyat Bersuara" di kanal YouTube Official iNews. Dari keseluruhan populasi tuturan tersebut, dilakukan proses kondensasi data untuk memisahkan tuturan yang relevan dengan fokus kajian. Proses penyaringan ini dilakukan melalui tiga tahap objektif. Pertama, mengeliminasi tuturan yang bersifat administratif seperti sapaan pembuka, pembacaan tata tertib oleh *host* dan jeda iklan. Kedua, menyeleksi tuturan substantif dari para tokoh debat yang memiliki potensi memicu atau merespons konfrontasi. Ketiga, melakukan klasifikasi ketat berdasarkan pemenuhan indikator lima strategi ketidaksantunan Jonathan Culpeper. Melalui proses penyaringan sistematis tersebut, diperoleh 107 tuturan yang secara valid teridentifikasi menggunakan strategi ketidaksantunan berbahasa. Distribusi frekuensi dan persentase kemunculan masing-masing dihitung berdasarkan total temuan data ketidaksantunan yaitu 107 tuturan, hal tersebut dipaparkan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Kemunculan Strategi Ketidaksantunan Culpeper

No	Strategi Ketidaksantunan Culpeper	Jumlah Kemunculan	Persentase (%)
1.	Ketidaksantunan Langsung	20	19%
2.	Ketidaksantunan Positif	37	34%
3.	Ketidaksantunan Negatif	20	19%
4.	Sarkasme atau Ejekan	11	10%
5.	Ketidaksantunan Tidak Langsung	19	18%
	Total Kemunculan	107	100%

Temuan data pada Tabel 1 menunjukkan sebuah pola komunikasi politik digital yang sangat konfrontatif dan agresif. Strategi ketidaksantunan positif menjadi jenis yang paling dominan muncul, yaitu sebanyak 37 kemunculan (34%). Hal tersebut menandai adanya kecenderungan kuat dari para penutur untuk secara sengaja menyerang muka positif (*positive face*) lawan tutur yang bertujuan merusak reputasi, harga diri, dan kredibilitas mereka di ruang terbuka. Selanjutnya, strategi ketidaksantunan langsung dan ketidaksantunan negatif muncul dengan frekuensi seimbang, masing-masing sebanyak 20 kemunculan (19%), diikuti oleh strategi ketidaksantunan tidak langsung sebanyak 19 kemunculan (18%). Sementara itu, strategi sarkasme atau ejekan menempati posisi terakhir dengan 11 kemunculan (10%).

Sebelum masuk pada analisis pembahasan yang lebih mendalam, terdapat pola temuan utama yang mengikat keseluruhan data ini. Pola makro menunjukkan bahwa penggunaan kelima strategi ketidaksantunan tersebut membentuk sebuah struktur konfrontasi verbal yang bersifat responsif-sistematis, bukan sekadar luapan emosi spontan. Pertama, tingginya angka ketidaksantunan positif (34%) yang berpadu dengan ketidaksantunan langsung (19%) memperlihatkan adanya pola "serangan depan secara terbuka untuk mendelegitimasi figur personal lawan politik secara instan di depan audiens siber. Kedua, kehadiran ketidaksantunan negatif (19%) dan tidak langsung (18%) membentuk pola defensif-retoris, di mana penutur menggunakan sindiran halus atau pembatasan ruang bicara untuk menyudutkan posisi argumen lawan tanpa terlihat melanggar aturan formal debat secara ekstrem.

Secara fungsional, pola interaksi ini bermuara pada tiga tujuan taktis spesifik yang menjawab arah penelitian ini: (1) untuk meruntuhkan kredibilitas dan mematahkan argumen politik lawan secara terbuka; (2) untuk mendominasi ruang tutur dan mengontrol jalannya debat melalui pembatasan kebebasan berpendapat lawan tutur; serta (3) untuk mendelegitimasi otoritas atau status sosial pihak lawan demi menggiring opini publik siber yang menyaksikan tayangan tersebut. Pola hubungan timbal balik antara bentuk ketidaksantunan, muatan konteks isu ijazah, dan pencapaian tujuan strategis masing-masing tokoh akan diurai secara komprehensif pada bagian pembahasan.

Dalam program debat biasanya lebih banyak didominasi temuan ketidaksantunan langsung dan ketidaksantunan positif (Sriwati et al., 2026). Dalam penelitian ini muncul adanya dominasi strategi ketidaksantunan positif (34%) sekaligus memunculkan diskusi kritis karena memperlihatkan pola yang berbeda dari tren studi debat politik di Indonesia pada umumnya. Pada beberapa riset debat politik konvensional, strategi yang kerap ditemukan mendominasi justru adalah ketidaksantunan langsung (*bald on record*) karena tuntutan panggung formal untuk menyerang argumen kebijakan secara instan. Namun, dalam konteks debat isu ijazah palsu ini, fokus serangan bergeser secara masif pada

penyerangan citra positif (*positive face*). Perbedaan ini terjadi karena muatan isu yang diperdebatkan bukan lagi seputar program kerja atau kebijakan publik, melainkan murni berkaitan dengan integritas pribadi, harga diri, dan keabsahan identitas personal sang tokoh. Hal ini membuktikan secara sosiopragmatik bahwa ketika komoditas debat digital lokal bergeser menjadi ranah pembunuhan karakter (*character assassination*), para penutur secara otomatis akan lebih banyak menginvestasikan tuturannya untuk merusak reputasi sosial dan wibawa personal lawan di hadapan publik.

Pembahasan

Ketidaksantunan Langsung (*Bald on Record Impoliteness*)

Bald on Record atau sering disebut ketidaksantunan secara langsung adalah ketidaksantunan yang dilakukan dengan sengaja mengancam muka (*Face Threatening Act*) dengan tidak menganggap muka lawan penting, sehingga tuturan yang disampaikan pun bersifat eksplisit dan tidak basa-basi (Culpeper et al., 2017). Dalam penelitian ini terdapat tuturan yang menunjukkan terjadinya ketidaksantunan langsung yaitu sebagai berikut.

Data 1

SN/00:18:43 : “Saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada.”

Data 2

RS/00:37:44 : “Yang kedua, pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan?”

Konteks data (1) terjadi pada segmen kedua debat ketika SN sedang menginterupsi pemaparan data mengenai keabsahan dokumen ijazah yang disampaikan lawan tuturnya, lawan tuturnya sedang menjelaskan bahwa jikalau memang ijazah Pak Jokowi palsu, buktikan saja. Namun, SN langsung memotong pembicaraan secara agresif untuk menghentikan narasi tersebut, yang kemudian diikuti oleh keheningan sejenak dari pihak lawan sebelum moderator mengambil alih kendali ruang tutur. Secara struktural data (1) menampilkan adanya bentuk tuturan asertif absolut dengan menggunakan diksi “yakin” dan “memang tidak ada” tidak terdapat kata pelemah hal ini menunjukkan bahwa adanya konfrontasi verbal yang merupakan upaya yang mendominasi interaksi untuk tidak memberikan ruang negosiasi argumen lawan tutur (Sukmawati et al., 2022). Selaras dengan pendapat Culpeper (2011) strategi ketidaksantunan langsung digunakan ketika penutur secara sengaja ingin mengabaikan upaya penyelamatan muka (*face saving*) karena ingin menyampaikan pesan dengan cara mendesak dan juga lebih efisien. Dalam konstelasi sosiopragmatik sikap absolut ini menunjukkan adanya dinamika kekuasaan (*power*) yang asimetris, dan penutur secara sengaja memunculkan adanya jarak sosial demi menunjukkan dominasi posisi di hadapan publik. Selaras dengan yang disampaikan Bousfield (2008) bahwa penggunaan strategi ketidaksantunan langsung tanpa adanya mitigasi dalam konflik memiliki tujuan untuk menampilkan dominasi posisi. Dalam sosiopragmatik, tuturan yang absolut seperti tuturan tersebut untuk mempertontonkan dominasi intelektual dan juga keberanian moral atas data yang diyakini kebenarannya.

Selanjutnya konteks pada data (2), RS dipersilakan oleh *host* untuk menyampaikan pendapatnya usai mendengarkan perdebatan sebelumnya, *host* memberikan kesempatan kepada RS, karena RS terlihat ingin menyampaikan suatu pesan. RS secara gamblang menggunakan label peyoratif melalui pilihan tuturan “pembohong” dan “pengecut” tanpa

berniat menghaluskan tuturannya. Penutur secara sengaja melakukan serangan frontal terhadap muka positif (*positive face*) yang mencakup aspek integritas dan kejujuran) lawan tutur. Data tersebut sekaligus merepresentasikan penggunaan strategi menantang (*challenging strategy*). Menurut Bousfield (2008), *challenging strategy* digunakan untuk menunjukkan posisi defensif sekaligus ofensif secara simultan demi mendelegitimasi kredibilitas lawan tutur secara nyata.

Dalam konteks sosiopragmatik, penggunaan label peyoratif seperti “pembongkaran” dan “pengecut” terhadap tokoh dengan status sosial tinggi (mantan presiden) merupakan bentuk kesadaran penuh dalam menggunakan ketidaksantunan untuk mendekonstruksi wibawa serta otoritas lawan di ruang terbuka. (Sikorskii dan Carrió-Pastor, 2026) menegaskan bahwa di dalam wacana digital, label peyoratif yang dilontarkan kepada tokoh publik memang diinstrumentalisasi untuk menjatuhkan citra moral lawan tutur secara instan. Perbedaan status sosial dan posisi kedua tokoh ini sangat memengaruhi seberapa besar dampak serangan verbal tersebut dalam menjatuhkan harga diri lawan (Benenowska, 2017).

Ditinjau lebih dalam dari konstelasi sosiopragmatik siber, manifestasi ketidaksantunan pada data (2) tidak sekadar melibatkan relasi ganda antara penutur dan lawan tutur, melainkan sebuah interaksi kompleks yang mengikutsertakan moderator debat dan audiens YouTube sebagai pihak ketiga. Munculnya tuturan menantang seperti “Kenapa rupanya? Mau Anda kriminalkan?” merupakan taktik retorik penutur untuk mengeksploitasi keterbatasan peran moderator. Penutur secara sengaja melanggar batasan kesantunan formal debat sebelum moderator sempat mengintervensi, sehingga menciptakan sebuah kepatutan komunikatif baru di dalam studio.

Lebih jauh lagi, serangan verbal ini sejatinya tidak ditujukan agar lawan tutur berubah pikiran, melainkan dikonsep secara taktis demi memikat audiens YouTube yang bertindak sebagai *overhearers*. Dengan membangun identitas diri sebagai sosok “pemberani” atau “pahlawan” yang tidak takut pada konsekuensi hukum, penutur sengaja menciptakan disharmoni sosial di ruang siber. Tujuannya adalah menggiring opini dan mengubah persepsi publik digital dalam menilai kredibilitas lawan tutur. Dalam arena *cyberpragmatics*, audiens YouTube memiliki kekuatan sosiologis untuk memvalidasi atau menolak konstruksi identitas tersebut melalui kolom komentar atau penyebaran ulang video, sehingga menjadikan ketidaksantunan ini sebagai komoditas retorik yang dihitung secara matang oleh penutur.

Ketidaksantunan Positif (*Positive Impoliteness*)

Positive Impoliteness atau sering disebut sebagai strategi ketidaksantunan positif ini dibangun khusus untuk menyerang muka positif dari seseorang, yaitu keinginan dasar sebagai seorang individu seperti ingin dihargai, dianggap penting, disukai dan juga dianggap menjadi bagian dari kelompok sosial (Culpeper et al., 2017). Secara teoretis strategi ketidaksantunan ini terfokus dalam membuat lawan tutur merasa dikucilkan dan tidak dianggap. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk mengabaikan, menggunakan sapaan yang tidak pantas, atau secara sengaja mencari ketidaksetujuan. Dalam penelitian ini ketidaksantunan positif paling tinggi jumlah kemunculannya karena upaya dalam merusak citra diri dan reputasi target menjadi hal utama dalam debat ini untuk dipertontonkan di publik media sosial. Hal tersebut dikarenakan dalam debat di ruang digital para penutur berupaya keras untuk menjaga “*citra kompeten*” masing-masing di kacamata publik, sembari menyerang citra lawan tuturnya. Hal itu selaras dengan yang disampaikan oleh (Benenowska, 2017) bahwa muka harus dipahami sebagai bentuk citra sosial atau representasi diri yang secara berulang dimanipulasi dan dibentuk dalam

interaksi, terutama bagi tokoh-tokoh publik. Berikut sampel data tuturan yang merupakan bentuk strategi ketidaksantunan positif.

Data 1

RS/00:35:00: *"Kenapa? Karena orang waras, ya sekali lagi orang waras akan berpikir ini lulusan Universitas Gajah Mada, katanya, kok bisa IP di bawah dua bisa lulus? Itulah makanya yang buat para otak-otak waras ini kemudian kita berpikir."*

Data 2

AA/00:20:34: *"Kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama"*

Konteks pada data (1) RS tersulut emosi ketika kesempatannya berbicara selalu dipotong oleh lawan tuturnya, RS menjelaskan awal kegaduhan mengenai ijazah palsu, bermula dari munculnya IPK yang sangat rendah namun dapat lulus dari UGM sehingga RS menggunakan label orang waras. Secara struktural ketidaksantunan positif dalam data tersebut dibangun dengan adanya teknik kohesi leksikal, yang berbentuk pengulangan (repetition) hal itu ditunjukkan dengan penggunaan frasa *"orang waras, ya sekali lagi orang waras"* menunjukkan adanya pengulangan. Menurut Halliday dan Hasan (2014) pengulangan digunakan untuk dapat memperkuat dan menekankan informasi. Dalam konteks debat kali ini pengulangan dilakukan untuk menekankan bahwa adanya perbedaan kualitas intelektual antara penutur dan lawan tutur. Penutur mengucapkan hal tersebut dengan sengaja untuk mengucilkan lawan ke dalam kelompok yang *"tidak waras"* dan juga *"tidak kompeten"*.

Repetisi frasa *"orang waras, ya sekali lagi orang waras"* mengonstruksi dikotomi identitas antar dua kelompok. Yaitu kelompok rasional (*in group*) dan kelompok yang diasosiasikan sebagai tidak rasional (*out group*). Melalui repetisi frasa ini, secara implisit penutur memposisikan diri dan pihak yang sependapat sebagai kelompok rasional. Di sisi lain lawan tutur dikonstruksikan dan diposisikan sebagai kelompok tidak rasional, yang dianggap tidak mampu berpikir logis. Dalam perspektif Culpeper (2011), strategi ini termasuk variasi ketidaksantunan positif *disassociate from the other* (pengecualian dari yang lain). Variasi ini digunakan secara sengaja untuk menciptakan batasan dan jarak sosial dengan mengeluarkan lawan tutur dari kelompok yang memiliki identitas positif. Pembentukan in-group dan out-group difungsikan untuk merendahkan atau mendegradasi kompetensi intelektual lawan dan mendelegitimasi muka positif lawan sebagai seorang yang kredibel di hadapan audiens.

Secara sosiopragmatik penggunaan frasa tersebut adalah bentuk manifestasi kekuasaan (*power*) untuk menentukan kebenaran secara sepihak (Benenowska, 2017). Selain itu terdapat adanya penggunaan sintaksis interogatif yaitu *"kok bisa IP di bawah dua bisa lulus?"* ini merupakan salah satu bentuk dari pernyataan paksa (*coercive statement*) yang menurut Bousfield (2008) hal tersebut digunakan untuk mengunci lawan dengan asumsi yang negatif dan tidak memberikan celah untuk melakukan pembelaan. Penggunaan fatis *"kok"* umumnya digunakan untuk menekankan sebuah alasan dan juga pengingkaran (R. K. Rahardi et al., 2014). Ditinjau dari perspektif *cyberpragmatic* penutur secara sengaja menggeser hubungan sosial antarnetizen yang bersifat horizontal menjadi sebuah hubungan vertikal yang tidak setara untuk menjatuhkan kredibilitas lawan (K. Rahardi, 2020).

Data (2) adalah bentuk positive impoliteness karena penutur menyerang *positive face* lawan. Yakni kebutuhan untuk dihargai sebagai individu yang rasional, bermartabat, dan cerdas. Meskipun tuturan disampaikan dengan kutipan seorang "filsuf" sehingga tampak seperti penyampaian pendapat yang bersifat umum, dalam konteks perdebatan

tersebut, kutipan berfungsi sebagai alat untuk mengasosiasikan lawan dengan kategori orang bodoh. Tetapi membangun inferensi bahwa pihak yang menerima atau mempercayai narasi lawan adalah individu yang mudah dimanipulasi. Sedangkan di sisi lain, pihak yang menggunakan agama dalam argumentasinya dikonstruksikan sebagai penebar "kebatilan". Dengan demikian, data (2) berfungsi sebagai sarana deligitimasi intelektual sekaligus moral terhadap lawan tanpa serangan personal secara langsung. Dalam perspektif Culpeper (1996; 2011), strategi ini mengancam *positive face* karena merusak citra sosial lawan tutur sebagai individu yang seharusnya dipercaya oleh publik.

Data (2) merepresentasikan varian *call the other names* sebagai salah satu variasi bentuk ketidaksantunan positif (Culpeper, 2011). Penutur tidak menyebut lawan secara eksplisit sebagai orang "bodoh". Tetapi menggunakan kutipan yang mengarahkan audiens untuk mengasosiasikan lawan dan pendukungnya dengan labelisasi tersebut. Penggunaan variasi ini merupakan strategi yang kuat untuk merusak identitas sosial, kompetensi intelektual, dan penerimaan sosial lawan.

Data 3

AD/01:43:57: "*Anda mantan mahasiswa kok ngotot. Anda bukan lembaga UGM. Anda bukan siapa-siapa yang UGM kok*"

Data 4

PR/00:57:43 : "*Bang Aiman saya ingin sampaikan burung berkicau itu kenapa ditempatkan di kandang? Karena banyak bacotny*"

Tuturan pada data (3) merupakan bentuk *positive impoliteness* karena secara sistematis menyerang *positive face* lawan dengan mendelegitimasi identitas sosial, otoritas, dan keanggotaannya dalam komunitas akademik UGM. Dalam konteks perdebatan mengenai keabsahan ijazah Presiden Jokowi, Ade Darmawan tidak lagi berfokus pada substansi dasar argumen yang disampaikan lawan, melainkan mengalihkan posisi serangan pada hak lawan untuk berbicara atas nama atau mewakili UGM. Repetisi klausa "Anda bukan..." mengonstruksi efek retorik yang semakin memperkuat kontradiksi terhadap status sosial lawan, sehingga lawan diposisikan sebagai pribadi yang tidak memiliki legitimasi, kewenangan, maupun pengakuan institusional.

Pada kata *ngotot*, penutur memberikan atribusi negatif yang merepresentasikan lawan sebagai seorang yang keras kepala dan tidak rasional, sehingga merusak citra dirinya sebagai peserta debat yang objektif. Frasa *bukan lembaga UGM* didayagunakan untuk mendelegitimasi otoritas lawan dengan menegaskan bahwa ia tidak memiliki kewenangan institusional untuk berbicara atas nama Universitas Gadjah Mada. Puncak serangan tampak pada kalimat "*Anda bukan siapa-siapa yang UGM kok*", yang secara eksplisit mencabut identitas sosial dan afiliasi lawan terhadap komunitas akademik UGM sehingga keberadaan dan otoritasnya diposisikan tidak bernilai dalam diskusi tersebut.

Menurut teori ketidaksantunan Culpeper (1996, 2011), tuturan ini merealisasikan variasi *exclude the other from an activity/group*, yaitu strategi mengeluarkan lawan dari kelompok sosial yang bernilai sebagai cara merusak *positive face*. Dalam konteks ini, penutur secara simbolik mengeluarkan lawan dari kelompok yang memiliki otoritas akademik UGM. Strategi tersebut diperkuat oleh penggunaan kalimat deklaratif berulang (*Anda bukan... Anda bukan...*) yang menghasilkan efek penegasan (*emphatic exclusion*). Bersamaan dengan itu, tuturan ini juga mengandung variabel *disassociate from the other* karena penutur secara implisit mengonstruksi ambang batas antara pihak yang dianggap memiliki otoritas akademik dengan pihak yang tidak layak berbicara atas nama institusi.

Melalui kombinasi strategi ini, penutur tidak hanya mencabut rasa memiliki (*sense of belonging*) dan melemahkan kredibilitas argumen lawan di hadapan audiens, melainkan juga mendegradasi kebutuhan dasar lawan untuk dihargai sebagai individu yang memiliki status sosial.

Data (4) teridentifikasi sebagai ketidaksantunan positif. Dalam konteks tuturan ini, penutur sedang merespons penjelasan lawan mengenai aspek hukum. Kemudian menginterupsi argumen tersebut dengan menggunakan metafora "*burung di dalam kandang*" yang diikuti ungkapan "*banyak bacotnya*". Penggunaan metafora binatang tersebut sebagai bentuk strategi dehumanisasi dalam tuturan debat, bukan sebagai pembenaran terhadap isi tuturan penutur. Dalam perspektif wacana pragmatik, pemilihan metafora merupakan bagian dari variasi strategi penamaan (*naming strategy*) yang merepresentasikan cara penutur mengonstruksi identitas lawan melalui pilihan leksikal tertentu (Fairclough, 2013). Penggunaan metafora "*burung di dalam kandang*" tidak lagi memosisikan lawan sebagai lawan tutur yang setara. Melainkan sebagai objek yang disamakan dengan hewan sehingga secara diskursif merendahkan martabat dan identitas sosialnya.

Menurut Culpeper (2011), bentuk tuturan semacam ini merealisasikan strategi *disassociate from the other*, yaitu upaya menciptakan jarak sosial dengan mereduksi status kemanusiaan lawan melalui dehumanisasi, sehingga *positive face* lawan sebagai individu yang layak dihormati mengalami ancaman. Serangan tersebut diperkuat oleh frasa "*banyak bacotnya*", yang berfungsi sebagai labelisasi negatif terhadap perilaku lawan dan semakin merusak citra moral maupun intelektualnya di hadapan audiens. Dari perspektif sosiopragmatik, penggunaan metafora dehumanisasi dan pelabelan negatif ini tidak dipahami sebagai luapan emosi semata. Akan tetapi sebagai strategi komunikatif yang dengan sengaja digunakan untuk mendelegitimasi lawan tutur dalam ruang debat digital. Temuan ini sejalan dengan Hardaker (2010) yang menjelaskan bahwa interaksi di ruang digital cenderung mendorong penggunaan tuturan yang agresif dan provokatif. Serta didukung oleh Bousfield (2008) yang menyatakan bahwa ketidaksantunan dalam interaksi konfliktual, seperti debat, sering dimanfaatkan sebagai strategi atau cara untuk mendapatkan dominasi dalam percakapan.

Ketidaksantunan Negatif (*Negative Impoliteness*)

Strategi ini sering disebut sebagai strategi ketidaksantunan negatif yang terfokuskan pada penyerangan terhadap muka negatif lawan tutur, yakni menunjukkan adanya keinginan dari seseorang untuk dapat memiliki kebebasan bertindak dan terbebas dari gangguan atau beban dari pihak lain. Dalam menganalisis konfrontasi verbal pada debat ini, peneliti menetapkan batasan kategori yang tegas antara strategi ketidaksantunan langsung (*bald on record impoliteness*) dan ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), mengingat beberapa data di lapangan menunjukkan adanya tumpang-tindih berupa unsur perintah langsung sekaligus tekanan terhadap otonomi lawan tutur.

Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada fokus target serangan verbal penutur. Sebuah data dikategorikan sebagai ketidaksantunan langsung apabila tuturan tersebut disampaikan secara langsung (eksplisit), tanpa basa-basi, dan berfokus penuh untuk menyerang atau meruntuhkan argumen lawan secara instan pada saat itu juga tanpa memedulikan kenyamanan interaksi. Sebaliknya, data akan dikelompokkan ke dalam ketidaksantunan negatif jika tekanan atau perintah langsung tersebut secara spesifik didesain untuk membatasi ruang gerak, menginvasi hak bicara, atau mengontrol kebebasan bertindak (*freedom of action*) lawan tutur dalam kelanjutan debat. Melalui

pemisahan indikator yang rigid ini, objektivitas pengelompokkan data dalam analisis sosiopragmatik ini dapat dipertahankan secara konsisten. Data tersebut disajikan sebagai berikut.

Data 1

SN/00:20:07: *"Siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya? Saya rela kehilangan kehormatan. Saya cium kakinya."*

Data 2

RS/00:51:37 : *"Makanya saya bilang Pak Joko Widodo, bertobatlah. Minta maaf kepada rakyat, mengaku saja Anda tidak pernah lulus S1 UGM."*

Konteks pada data (1) pada saat situasi mulai memanas, SN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dalam hal ini SN langsung membuka dengan kalimat yang menantang, serta menggunakan gestur menunjuk disertai dengan senyuman tipis. Secara struktural, data (1) memanfaatkan adanya konstruksi kalimat interogatif yang konfrontatif, dan diikuti dengan pernyataan yang hiperbolis seperti *"rela kehilangan kehormatan"* dan *"cium kaki"*. Secara lingual tuturan tersebut tergolong dalam strategi ketidaksantunan negatif dikarenakan menyerang keinginan seseorang untuk bebas dari paksaan, tidak diganggu ruang pribadinya, dan juga memiliki otonomi. Hiperbola yang digunakan dalam konteks penyerangan muka (*face attack*) bukan hanya hiasan saja, melainkan strategi menekan (*frightening*) lawan secara psikologis agar terpojok (Culpeper, 2011). Kalimat interogatif dalam tuturan tersebut dimanfaatkan sebagai instrumen paksaan (*coercive*) yang secara langsung menginvasi otonom dari lawan tutur yang menurut Hansson (2024) merupakan teknik yang digunakan untuk membatasi pilihan tindakan dari subjek untuk kepentingan penutur.

Selain itu tuturan tersebut juga menunjukkan adanya otoritas penutur, yang ingin mengatur kebebasan lawan tuturnya. Menurut Culpeper et al. (2017) juga menyatakan bahwa ketidaksantunan negatif bertindak seolah-olah penutur memiliki posisi yang lebih tinggi dalam segala hal sehingga memiliki hak untuk mengatur orang lain. Ditinjau dari kacamata sosiopragmatik data tersebut menunjukkan adanya kesengajaan penutur yang memanfaatkan ruang digital yang bersifat publik dan seharusnya bersifat formal menjadi arena konfrontasi verbal untuk menjatuhkan wibawa subjek. Melalui janji untuk merendahkan diri secara hiperbolis, penutur sebenarnya sengaja memilih diksi tersebut untuk memegang kendali dalam debat tersebut dengan melakukan agresi otoriter. Hal tersebut juga selaras dengan hasil temuan penelitian dari (Yamjirin, 2025) mengenai ketidaksantunan negatif yang dimanfaatkan untuk menyoroti perselisihan antara pihak yang dominan dengan pihak yang patuh (*dominant submissive struggles*) untuk menunjukkan agresi otoriter penutur. Dengan demikian, tuturan ini sukses dalam melumpuhkan kebebasan lawan tutur serta membangun citra penutur sebagai pihak yang memiliki dominasi posisi dalam diskursus digital tersebut.

Konteks pada data (2) adalah RS sedang mencocokkan mengenai lembar pengesahan skripsi, dan membuat klaim bahwa terdapat keganjalan, sehingga RS meminta Pak Jokowi untuk segera mengaku. Secara struktural didominasi oleh penggunaan kata kerja imperatif kategori perintah dengan paksaan (*coercive*) seperti penggunaan kata *"bertobatlah"*, *"minta maaf"*, dan *"mengaku saja"*. Penggunaan konstruksi direktif ini merupakan wujud konkret dari strategi ketidaksantunan negatif. Hal ini dikarenakan tuturan tersebut secara agresif menyerang hak otonomi paling mendasar dari lawan tutur, yaitu kebebasan untuk menentukan tindakannya sendiri, sekaligus secara paksa mengabaikan keinginan dasar subjek untuk terbebas dari tekanan

pihak lain (Culpeper, 2011). Secara pragmatik, instruksi eksplisit yang memaksa orang lain untuk bertobat, meminta maaf, dan mengakui kesalahan bertindak sebagai instrumen koersif yang merampas ruang gerak dan hak menentukan sikap dari subjek demi memenuhi agenda penutur (Hansson, 2024). Poin utama pelanggaran otonomi ini terlihat dari bagaimana penutur tidak lagi menyisakan pilihan alternatif bagi lawan tutur selain tunduk pada skenario pelanggaran harga diri yang telah dikonsep.

Dikaji dari sudut pandang sosiopragmatik, penggunaan frasa “makanya saya bilang...” menampilkan adanya asumsi superioritas moral dan intelektual dari penutur untuk melegitimasi tindakan intervensi terhadap hak pribadi lawan tersebut, seolah-olah penutur memiliki posisi hierarki yang lebih tinggi (Culpeper et al., 2017). Tuturan data (2) ini mengilustrasikan adanya perjuangan dominasi (*dominant-submissive struggles*) melalui pemaksaan otoriter guna memamerkan kekuasaan di hadapan publik siber (Yamjirin, 2025). Penutur secara sadar memanfaatkan strategi ini untuk mendekonstruksi wibawa dan otoritas lembaga kepresidenan melalui tuntutan yang merendahkan, yang membuktikan bahwa status sosial tinggi lawan tutur justru dijadikan sasaran untuk memperbesar dampak destruktif terhadap muka (Benenowska, 2017). Dalam ruang publik digital seperti YouTube, tindakan mendelegitimasi kekuasaan ini dilakukan dengan meruntuhkan citra moral dan integritas akademis lawan tutur secara langsung guna memicu opini publik (Sikorskii dan Carrió-Pastor, 2026).

Hal ini juga mencerminkan adanya upaya penutur untuk menggeser relasi sosial yang bersifat horizontal di media sosial menjadi hubungan vertikal yang tidak setara, yang bertujuan menjatuhkan kredibilitas subjek di mata audiens (K. Rahardi, 2020). Pilihan diksi yang memaksa ini memperlihatkan bahwa penutur merasa memiliki hak untuk mengatur tindakan orang lain karena adanya dukungan dari massa digital yang searah dengan pemikirannya. Taktik ini secara sosiopragmatik memanfaatkan rasa kebal hukum (*impunity*) di internet untuk memberikan tuturan yang bersifat provokatif dan konfrontatif (Hardaker, 2010). Dengan demikian, tuturan tersebut bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah strategi terencana untuk mendominasi percakapan dan menciptakan disharmoni sosial melalui pelumpuhan otonomi lawan tutur (Bousfield, 2008). Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa ketidaksantunan negatif dalam debat tersebut digunakan sebagai senjata politik untuk menarik turun status subjek ke tingkat yang paling rendah di hadapan publik.

Sarkasme dan Ejekan (*Sarcasm and Mock Impoliteness*)

Strategi *sarcasm and mock impoliteness* memanipulasi kesantunan verbal untuk menyampaikan efek ofensif. Agar analisis berjalan presisi, perlu membedakan batas keempat konsep di dalamnya yang sering tumpang-tindih. Ironi adalah ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan dan makna tersirat yang sebenarnya bersifat netral. Ketika ironi didesain dengan tekanan agresif untuk menyakiti lawan tutur, konstruksinya berubah menjadi sarkasme. Sementara itu, *mock politeness* (kesantunan semu) terjadi ketika penutur menggunakan formula kesantunan (seperti sapaan hormat) secara tidak tulus (*insincere*) sebagai tameng hinaan implisit (Levant et al., 2026). Merujuk pada temuan Abbasova (2024), perbedaan substantif antara sarkasme dan ejekan terletak pada tingkat ketersinggungan dan wujud bahasanya; sarkasme bertindak sebagai tingkat kritik tertinggi yang berorientasi penuh pada strategi menyerang muka guna merendahkan lawan secara tajam, sedangkan ejekan sosiopragmatik (*mock impoliteness*) memanipulasi kesopanan permukaan sebagai instrumen kesopanan pura-pura untuk menyembunyikan maksud ofensif. Perbedaannya dengan ejekan langsung adalah ejekan langsung disampaikan secara eksplisit, literal, dan tanpa manipulasi makna tersirat.

Berdasarkan klasifikasi data, perwujudan strategi *sarcasm and mock impoliteness* dalam debat ini tidak hanya muncul dalam bentuk sindiran klasik, melainkan juga dimanifestasikan melalui konstruksi interogatif khusus dan pengandaian ekstrem. Sampel data tersebut dipaparkan sebagai berikut.

Data 1

PR/01:00:19 : *"Ibu pengacara? Pengacara?"*

Data 2

SN/ 01:27:01 : *"Kalau memang Pak Jokowi sudah tidak perlu lagi dipermasalahkan karena ijazahnya palsu, berarti lebih baik ditutup saja semua kurikulum tentang moral."*

Konteks pada data (1) adalah PR secara langsung memotong lawan bicaranya dikarenakan dianggap berputar-putar dalam menjelaskan hukum, audiens secara serentak bersorak dan bertepuk tangan karena melihat situasi dan kondisi semakin memanas. Justifikasi kategorisasi pada data (1) penting untuk diperjelas karena secara struktural tuturan tersebut hadir dalam bentuk kalimat interogatif yang diikuti teknik reduplikasi (pengulangan). Meskipun berwujud pertanyaan, tuturan tersebut tidak diproduksi untuk meminta informasi (*genuine question*), melainkan berfungsi sebagai interogatif meremehkan (*belittling interrogative*). Penutur secara sengaja mengulang kata "pengacara" dengan intonasi meninggi untuk menciptakan efek sanggahan yang merendahkan. (Taylor, 2015) menyatakan bahwa ciri khas dari sarkasme atau ejekan adalah adanya pengulangan yang berlebihan untuk menunjukkan kontradiksi makna harfiah dengan konteks situasi yang menyerang.

Jika dikaji dalam konstelasi sosiopragmatik, interogatif meremehkan ini digunakan sebagai bagian dari strategi *mock impoliteness* untuk mengevaluasi sekaligus mendegradasi kapasitas profesional lawan tutur di hadapan publik siber. Penutur secara tersirat mempertanyakan kelayakan lawan tutur dalam menyandang profesi tersebut. Sejalan dengan temuan (Sikorskii dan Carrió-Pastor, 2026), serangan terhadap kapasitas (*capacity*) adalah bentuk evaluasi negatif yang jamak dalam ketidaksantunan politik guna mempertanyakan kualitas intelektual serta profesionalitas seseorang agar diragukan oleh audiens.

Selanjutnya, konteks pada data (2) *host* memberikan kesempatan SN untuk menjawab pertanyaannya mengenai untuk apa ijazah Pak Jokowi dipermasalahkan sedangkan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, SN meresponsnya dan sekaligus memberikan *closing statement*. Dalam hal ini strategi sarkasme dikonstruksikan menggunakan logika kondisional (*if-then*) yang diakhiri dengan saran destruktif. Penutur menggunakan tuturan formal di awal, lalu menutupnya dengan simpulan ekstrem berupa usulan agar "semua kurikulum tentang moral ditutup saja". Hal ini selaras dengan pandangan Culpeper et al. (2017) bahwa teknik sarkasme sering kali memanfaatkan logika formal di permukaan, namun memiliki target substantif untuk menyerang muka lawan tutur. Melalui premis pengandaian yang absurd ini, penutur tidak sedang memberikan saran kebijakan pendidikan yang sesungguhnya, melainkan melempar senjata retorik untuk menyindir kepasifan pihak-pihak yang membela keabsahan ijazah tersebut.

Dilihat dari lensa sosiopragmatik, taktik menyindir integritas lawan tutur melalui logika ekstrem ini sangat efektif untuk menggiring opini publik siber. Saran sarkastik tersebut sengaja mengonstruksi lawan tutur sebagai pihak yang mengabaikan nilai moral

dan kejujuran. (Sikorskii dan Carrió-Pastor, 2026) menekankan bahwa penggunaan sarkasme yang berkaitan dengan integritas moral kerap digunakan untuk menciptakan "eksklusi pragmatis", di mana lawan tutur diposisikan sebagai pihak yang tidak layak lagi berada dalam lingkaran diskusi yang rasional atau etis. Di *platform* YouTube, taktik mendelegitimasi lewat sarkasme ini sangat diandalkan karena mampu menjatuhkan kredibilitas lawan secara fungsional tanpa perlu melanggar aturan formal komunitas (*community guidelines*).

Ketidaksantunan Tidak Langsung (*Off-Record Impoliteness*)

Ketidaksantunan Tidak Langsung (*Off-Record Impoliteness*) dilakukan menggunakan implikatur dengan semaksimal mungkin sehingga satu niat yang dapat dikaitkan jelas lebih besar daripada yang lainnya (Culpeper et al., 2017). Berikut contoh temuan sampel data dari ketidaksantunan tak langsung.

Data 1

RS/01:39:29 : *"Ini SMA 6 Yogyakarta itu almarhum Mulyono Joko Widodo Surakarta. Ini mainnya kurang cantik ini."*

Data 2

RS/01:57:07 : *"Semua bisa baca dari yang ee doktor, profesor kemudian sampai yang pengen disebut sarjana ya."*

Data (1) dibangun melalui konteks lawan tutur menghadirkan data berupa sampul buku UGM mengenai data alumni ditayangkan di layar, yang kemudian belum sempat banyak menjelaskan, dipotong oleh RS dengan melihat tulisan yang tertera di dalamnya yang menurutnya keliru, bukan sekolah yang dulunya menjadi tempat Pak Jokowi bersekolah. Secara struktural data (1) menggunakan teknik penjajaran (*juxtaposition*) fakta kontras dengan memanfaatkan metafora. Penutur secara sengaja membenturkan "SMA 6 Yogyakarta" dengan nama "almarhum Mulyono Joko Widodo Surakarta" untuk membingungkan audiens. Kunci dari tuturan ini disebut sebagai ketidaksantunan tak langsung terdapat pada penggunaan metafora "mainnya kurang cantik". Penggunaan kata "mainnya" merujuk pada suatu skenario atau upaya yang dilakukan oleh lawan tutur sebagai upaya menyembunyikan sesuatu.

Selanjutnya penggunaan frasa "kurang cantik" dijadikan sebagai evaluatif yang menampilkan lawan tutur yang tidak teliti, ceroboh, gagal dalam membentuk strategi dalam menyusun kebohongan. Itu artinya tuturan tersebut merupakan bentuk dari ketidaksantunan tak langsung, karena penutur memiliki maksud yang lebih besar daripada tuturan yang diucapkannya. Secara sosiopragmatik, tuturan ini memanfaatkan implikatur untuk menjatuhkan lawan secara terselubung tanpa langsung mengatakan "ijazahnya palsu ini, memakai ijazah orang lain" secara langsung. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh Culpeper et al. (2017) strategi ketidaksantunan tak langsung memungkinkan untuk menyampaikan maksud yang lebih besar dari apa yang diucapkan oleh penutur.

Dengan membenturkan data yang ditampilkan oleh lawan tutur, penutur secara sengaja ingin memancing audiens untuk menyimpulkannya secara sendiri bahwa lawan tutur melakukan upaya penipuan identitas. Audiens YouTube dapat menangkap maksud implikatur ofensif ini karena mereka mengorelasikan tuturan tersebut dengan pengetahuan bersama (*shared knowledge*) serta konteks sosial-politik luar tutur terkait latar belakang nama masa kecil sang tokoh yang sedang viral di media sosial. Melalui proses inferensi kognitif tersebut, audiens berhasil memecahkan kode pesan tersirat

penutur tanpa perlu penjelasan eksplisit. Hal ini memberikan penutur celah untuk mengelak, karena penutur hanya menyebutkan nama, tidak secara langsung mendelegitimasi lawan tuturnya. Strategi ini dipilih untuk mengecohkan audiens agar audiens dapat menarik kesimpulan sendiri.

Data (2) dibangun karena adanya konteks RS diberikan kesempatan untuk melakukan *closing statement* dengan menjelaskan bahwa tujuan menulis buku bukan untuk BAP, namun untuk seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang pendidikan. Secara struktural, data (2) memanfaatkan teknik kontras hierarkis dan juga penurunan skala (*down scaling*). Tuturan tersebut termasuk ke dalam kategori ketidaksantunan tidak langsung karena penutur secara tidak langsung dengan menggunakan teknik menyindir tanpa menyebut nama untuk menjatuhkan lawan bicara. Penggunaan frasa “sampai yang pengin disebut sarjana” ini memiliki makna menyindir seseorang yang ingin disebut sarjana padahal ijazahnya masih diragukan ada atau tidaknya. Dalam tuturan tersebut penutur menggunakan frasa yang ambigu agar penutur memiliki celah untuk menyangkal.

Audiens digital dapat menangkap maksud implikatur pada data (2) ini dengan mengandalkan konteks deiktik pembicaraan, yakni dengan mengidentifikasi arah pandangan dan giliran bicara (*turn-taking*) siapa tokoh yang sedang ditargetkan saat tuturan tersebut dilemparkan di studio. Tuturan tersebut juga secara tidak langsung menampilkan skala akademik yang kontras dengan penyebutan “doktor”, “profesor” di awal untuk membangun ekspektasi tinggi, namun di bagian akhir menyatakan bahwa intinya menyentuh gelar sarjana saja tidak bisa. Dilihat dari sisi sosiopragmatik hal ini merupakan sindiran tajam yang disampaikan dengan cara yang halus. Penutur menggunakan ketidaksantunan tidak langsung agar konfrontasi verbalnya dapat sampai ke audiens bahwa ijazah itu palsu dengan memanfaatkan penggunaan implikatur semaksimal mungkin. Struktur urutan ini memberikan efek penurunan skala (*down scaling*) (Martin dan White, 2007). Status target diletakkan di paling akhir bahkan di luar kategori profesional untuk menyoroti kegagalan akademisnya. Penggunaan diksi ambigu ini memastikan bahwa secara tekstual penutur tidak melanggar aturan, namun memiliki pesan terselubung di dalamnya.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konfrontasi verbal dalam debat isu ijazah palsu di kanal YouTube Official iNews bukan sekadar saling bertukar argumen yang memanaskan saja, namun juga sebuah arena kontestasi wacana sesuai dengan strategi ketidaksantunan Culpeper. Temuan menampilkan bahwa ketidaksantunan yang digunakan bukan hanya sekadar luapan emosi sesaat, namun juga sebagai strategi untuk mendelegitimasi argumen dan kredibilitas dari lawan tutur. Ketidaksantunan yang banyak ditemukan di dalam debat ini adalah ketidaksantunan positif (*positive impoliteness*) sebanyak (34%), hal ini menunjukkan bahwa dalam ruang publik digital di Indonesia, debat lebih cenderung fokus menyerang “citra kelompok” dan juga “harga diri” dibanding menyerang kebijakan ataupun kebebasan bertindak lawan. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan seluruh manifestasi strategi Culpeper yang meliputi ketidaksantunan langsung (*bald on record impoliteness*), ketidaksantunan positif, ketidaksantunan negatif (*negative impoliteness*), sarkasme atau ejekan (*sarcasm/mock impoliteness*), dan ketidaksantunan tidak langsung (*off-record impoliteness*) yang masing-masing dioperasikan secara taktis oleh para tokoh. Ketidaksantunan juga digunakan sebagai strategi performatif yang dilakukan dengan sengaja di depan publik. Dalam konteks debat, penggunaan bahasa yang agresif dijadikan alat taktis untuk memenangkan debat,

mematahkan otoritas lawan, dan juga meyakinkan audiens digital. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa etika komunikasi sering dikesampingkan demi mencapai tujuan retorik.

Dilihat dari kacamata linguistik, penelitian ini menekankan bahwa ketidaksantunan dalam diskursus politik di Indonesia tidak dapat dipahami hanya sebatas penyimpangan norma kesopanan, melainkan sebuah bentuk strategi yang memiliki nilai ideologis dan pragmatis yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi konkret dalam bidang pragmatik, khususnya dalam menjelaskan bahasa agresif yang dipertontonkan secara terbuka di media sosial. Meskipun memberikan wawasan yang dalam mengenai mekanisme ketidaksantunan, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis dari satu sumber saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan.

Disarankan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan data, dengan membandingkan data satu dengan data yang lainnya, atau bahkan dengan platform yang berbeda. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat agar lebih peka mengenai pentingnya etika berkomunikasi di ruang publik digital, dan menjadi masyarakat yang tidak mudah menyimpulkan tanpa mencari tahu kebenarannya. Besar harapan penelitian ini dapat mendukung terciptanya literasi digital yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Abbasova, A. A. (2024). The Role Of Irony In Expressing Impoliteness. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, (2(42)). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062024/8164
- Aminuddin, M., & Musfiroh, T. (2025). Ketidaksantunan Dalam Komentar Publik Pada Video Pidato Perdana Presiden Prabowo: Kajian Sosiopragmatik. *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, 9(1), 25–48. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2025.090102>
- Benenowska, I. (2017). Impoliteness in the media and its reception. In A. Baczkowska (Ed.), *Impoliteness in Media Discourse* (pp. 179–205). Peter Lang AG. <https://doi.org/10.3726/978-3-653-03511-7>
- Bousfield, D. (2008). Impoliteness. In *The International Encyclopedia of Communication*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781405186407.wbieci098>
- Culpeper, J. (2011). *Impoliteness: Using Language to Cause Offence*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511975752>
- Culpeper, J., Haugh, M., & Kádár, D. Z. (Eds.). (2017). *The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-37508-7>
- Fadlilah, A., Khuzaemah, E., Zuhdi, I., & Rahmawati, R. (2023). Ketidaksantunan Berbahasa di Indonesia: Kajian Sociolinguistik (Impoliteness in Language in Indonesia: A Sociolinguistic Study). *Indonesian Language Education and Literature*, 8(2), 290–304.
- Graham, S. L., & Hardaker, C. (2017). (Im)politeness in Digital Communication (J. Culpeper, M. Haugh, & D. Z. Kádár, Eds.; pp. 785–814). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-37508-7_30
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (2014). *Cohesion in English*. Routledge.
- Hansson, S. (2024). Coercive impoliteness and blame avoidance in government communication. *Discourse, Context & Media*, 58, 100770. <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2024.100770>

- Hardaker, C. (2010). Trolling in asynchronous computer-mediated communication: From user discussions to academic definitions. *Journal of Politeness Research. Language, Behaviour, Culture*, 6(2). <https://doi.org/10.1515/jplr.2010.011>
- Hernández-Flores, N. (2008). Politeness and other types of facework: Communicative and social meaning in a television panel discussion. *Pragmatics*, 18(4), 681–706. <https://doi.org/10.1075/prag.18.4.06her>
- Khoironi, H., Santosa, R., & Arifuddin, A. (2025). Peran Tahapan Naratif dalam Membangun Strategi dan Respons Ketidaksantunan Serial Omar: Kajian Sosiopragmatik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(3), 3862–4874. <https://doi.org/10.30605/onoma.v11i3.6743>
- Leech, G. N. (2014). *The pragmatics of politeness*. Oxford University Press.
- Levant, E., Kuzai, E., & Morin, C. (2026). Beyond mock politeness: Sarcastic interrogatives as tools for face-threatening acts. *Journal of Politeness Research*, 22(1), 103–131. <https://doi.org/10.1515/pr-2024-0056>
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2007). *The language of evaluation: Appraisal in English* (Paperback ed., 1. publ). Palgrave Macmillan.
- Mayrita, H., Rahmawati, S., Sholikhah, H. A., Wongprakob, W., Hidayat, M., Fortunasari, F., Masita, E., & Marzulina, L. (2025). Language Politeness In Digital Streaming: The Implications To Education And Ethics In Communications For The Technological Era. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 9(3), 1079–1090. <https://doi.org/10.22437/jiituj.v9i3.44388>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurfritri, R., Anwar, M., & Sulistyaningrum, S. D. (2026). Ketidaksantunan Berbahasa dalam Interaksi Netizen dan Grok AI pada Platform X: Kajian Pragmatik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.30605/onoma.v12i1.7357>
- Rahardi, K. (2020). Konteks Pragmatik Dalam Perspektif Cyberpragmatics. *Linguistik Indonesia*, 38(2), 151–163. <https://doi.org/10.26499/li.v38i2.132>
- Rahardi, R. K., Setyaningsih, Y., & Dewi, R. P. (2014). Kata Fatis Penanda Ketidaksantunan Pragmatik Dalam Ranah Keluarga. *Adabiyyāt: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 149–175. <https://doi.org/10.14421/ajbs.2014.13201>
- Şekerci, Ö. (2023). Culpeper's Impoliteness Strategies in Neil Simon's 'Biloxi Blues.' *Baltic Journal of English Language, Literature and Culture*, 13, 125–141. <https://doi.org/10.22364/BJELLC.13.2023.09>
- Sikorskii, S., & Carrió-Pastor, M. L. (2026). Appraising impoliteness on X: A case study of Isabel Díaz Ayuso. *Journal of Pragmatics*, 254, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2025.12.010>
- Simanjuntak, H. M., & Simatupang, E. C. (2024). Impoliteness Strategies In The Third Indonesia Presidential Debate 2024: Pragmatics Research. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 10(3), 3064–3073. <https://doi.org/10.30605/onoma.v10i3.4080>
- Sriwati, S., Sudana, D., Gunawan, W., Agung, M., & Erwin, Y. (2026). Strategic Impoliteness In Televised Political Debates: Towards An Integrative Model Of Media-Mediated Political Communication. *English Review: Journal of English Education*, 14(2), 423–436. <https://doi.org/10.25134/englishreview.v14i2.221>
- Sukmawati, N. N., Hakim, L. N., Hastomo, T., Taman, P., & Lia, H. (2022). (Im)politeness Strategies Used in Vice -Presidential Candidates Debate Between Mike Pence and Sen. Kamala Harris. *IDEAS: Journal on English Language Teaching and Learning*,

- Linguistics and Literature, 10(2), 1735–1743.
<https://doi.org/10.24256/ideas.v10i2.2990>
- Taylor, C. (2015). Mock Politeness in English and Italian: A Corpus-assisted Study of the Metalanguage of Sarcasm and Irony. [Phd, Lancaster University].
<https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/133389/>
- Yamjirin, A. J. (2025). Culpeper's Impoliteness Strategies in the Devil May Cry 3 Cutscenes: Analyzing the 'Chaos' Warm Welcome' Dialogues from Mission 13. JLA (Jurnal Lingua Applicata), 8(2), 72–88. <https://doi.org/10.22146/jla.105000>